Gawai

Kewirausahaan Desa

Pergerakan Desa Menuju Sejahtera dan Mandiri Ekonomi

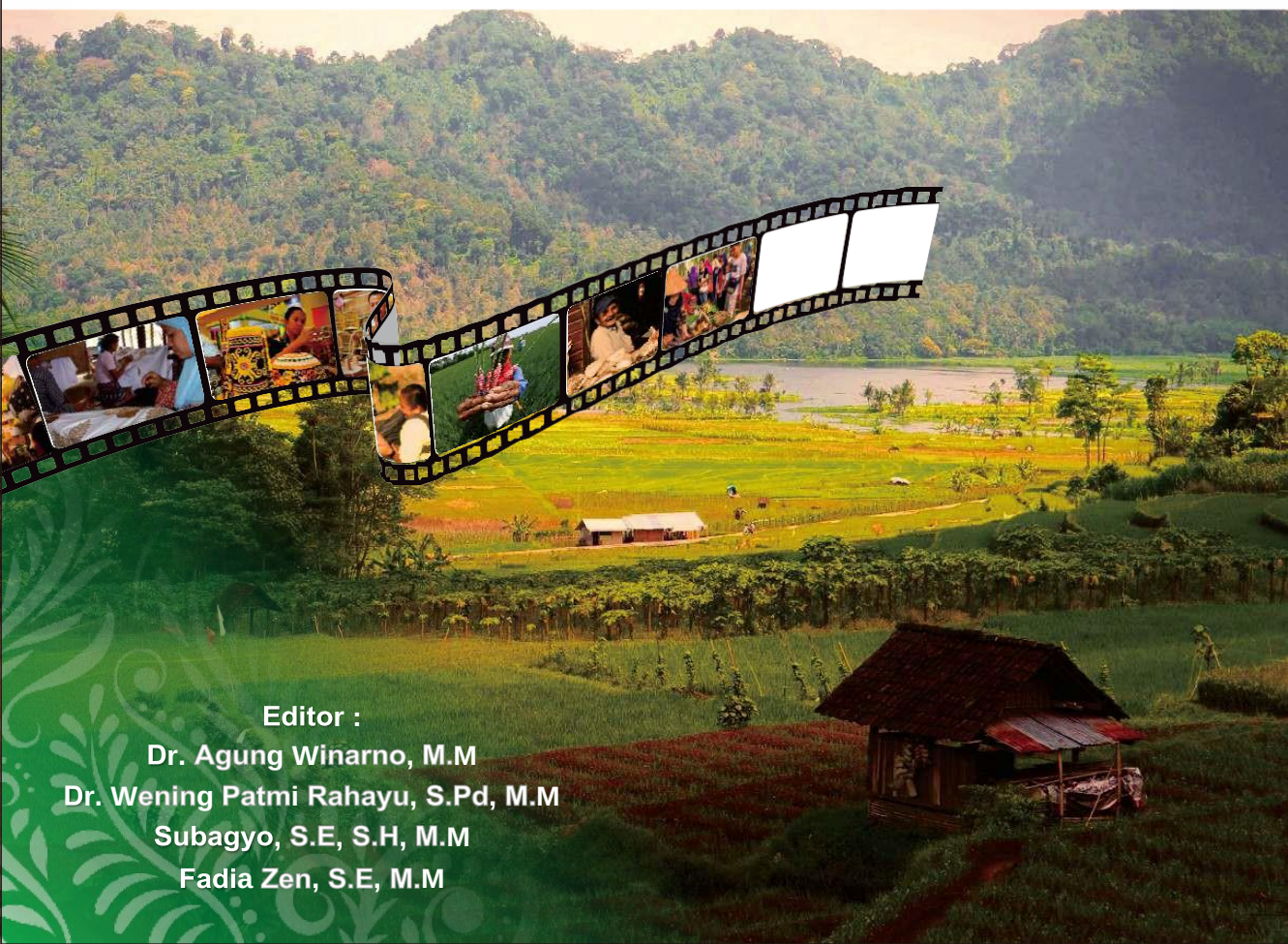

Editor :

Dr. Agung Winarno, M.M

Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd, M.M

Subagyo, S.E, S.H, M.M

Fadia Zen, S.E, M.M

GAWAI KEWIRAUSAHAAN DESA:

PERGERAKAN DESA MENUJU SEJAHTERA DAN MANDIRI EKONOMI

Editor:
Dr. Agung Winarno, M.M
Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd, M.M
Subagyo, S.E, S.H, M.M
Fadia Zen, S.E, M.M

Penerbit
CV. Bintang Sejahtera
2019

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

GAWAI KEWIRAUSAHAAN DESA:

PERGERAKAN DESA MENUJU SEJAHTERA DAN MANDIRI EKONOMI

@ CV. Bintang Sejahtera

Perpustkaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mereproduksi atau memindahkan keseluruhan maupun bagian buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun baik secara elektronis, mekanis termasuk fotokopi, rekaman, maupun sistem penyimpanan lain tanpa ijin dari pernerbit.

Penulis : Bahri, dkk
Editor : Dr. Agung Winarno, M.M
Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd, M.M
Subagyo, S.E, S.H, M.M
Fadia Zen, S.E, M.M
Desain Cover : Ofan Dhika Dwi Kurniawan
Kata Pengantar : Ali Nurrosidah
Pendahuluan : Trisetia Wijijayanti
Penyuting Akhir : Ingga Dwi Liani
Trisetia Wijijayanti
Cetakan I : Desember 2019
ISBN : 978-602-1150-36-8

Diterbitkan oleh **Penerbit CV. Bintang Sejahtera**
Anggota IKAPI (No: 136/JTI/2011)
Jl. Tirtomulya VI/1B landungsari Malang.
Phone 085102744383
Email: cetakterbit.bs@gmail.com

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku kumpulan hasil penelitian dari beberapa dosen di seluruh Indonesia ini dapat diselesaikan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Buku dengan judul "Gawai Kewirausahaan Desa: Pergerakan Desa Menuju Sejahtera dan Mandiri Ekonomi" dibuat untuk mendukung pengembangan dan pergerakan kewirausahaan desa di Indonesia. Kewirausahaan desa dibutuhkan dalam mewujudkan pemberdayaan desa untuk mampu mengatur dan mengelola secara mandiri sumber daya serta potensi desa demi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indonesia yang merupakan negara berkembang perlu meningkatkan kewirausahaan desa sebagai strategi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi perekonomian desa yang menjadikan masyarakat lebih kreatif dan mandiri.

Atas terselesaikannya buku kumpulan penelitian ini, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada:

- Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si dan Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag. selaku ketua dan sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang,
- Dr. Cipto Wardoyo, S.E, M.Pd, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang,
- Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang,
- Penerbit CV. Bintang Sejahtera yang telah membantu dalam proses pengeditan dan pencetakan,
- Para peneliti

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Semoga dengan penerbitan buku ini, dapat mendorong peneliti dan generasi berikutnya untuk mendukung, berkreasi, dan mengembangkan tentang kajian kewirausahaan desa demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian desa untuk menuju desa sejahtera dan mandiri.

Desember
2019

Editor

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

PENDAHULUAN: GAWAI KEWIRAUSAHAAN DESA ..... **vi**

Membangun Perekonomian dan Kewirausahaan Pedesaan Menuju Masyarakat Mandiri (**Bahri Bhenu Artha dan Widodo Prasetyo**: *Universitas Widya Mataram*) 1

Model *Ecomarketing*: Pengembangan Produktif dan Berkelanjutan Wisata Pedesaan (**Yuli Agustina, Trisetia Wijijayanti, Agung Winarno, dan Wening Patmi Rahayu**: *Universitas Negeri Malang*) 34

Network Resources, Organizational Agility, Absorptive Capacity, dan *Firm Performance* UMKM JABODETABEK (**Evo Sampetua Hariandja, Ferliro Daniel S, Michael Prayogo N. dan Rudyanto***: Universitas Pelita Harapan*) 61

Strategi *Words of Mouth Marketing* dalam Jaringan Komunitas Mebel Sentra Pengrajin Jepara Jawa Tengah (**Iswahyu Pranawukir**: *Institut Bisnis* dan *Informatika Kosgro 1957*) 89

Analisis Pelatihan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Kemampuan Kewirausahaan (**Puji Muniarty, Nurhayati, dan Aliah Pratiwi***: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima*) 120

Viral Marketing dan Motivasi Wisatawan dalam Meningkatkan Minat Berkunjung pada Destinasi Wisata di Kabupaten Bima (**Sri Ernawati***: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima*) 148

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

PENDAHULUAN
GAWAI KEWIRAUSAHAAN DESA

Pergerakan Desa Menuju Sejahtera dan Mandiri Ekonomi

Konsep desa sejahtera mandiri mengandaikan adanya sebuah kontruksi pemikiran yang menempatkan "Desa" pada posisi subjek, organisasi social yang harus diberi kepercayaan penuh oleh "orang luar" untuk mengatur dirinya, dengan kekuatan dan modal yang ada pada dirinya. Konsep "Desa Sejahtera Mandiri" membutuhkan "cara pandang lain" tentang desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekelaurgaan, dan kegotongroyongan.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan kewirausahaan menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Pemerintah saat ini mendorong kewirausahaan desa yang diharapkan dengan penataan ekonomi dimulai dari desa yang memanfaatkan sumber daya dan potensi desa secara optimal dapat berkembang. Pemerintah mulai membuat peraturan mengernai kewirausahaan desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Dalam peraturan ini menekankan bahwa pemerintah sebagai fasilitator kewirausahaan desa serta menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk melaksanakan kewirausahaan desa.

Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai kewirausahaan desa, pemerintah mengharuskan adanya partisipasi masyarakat untuk melaksanakan program kewirausahaan desa. Partisipasi yang ditujukan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya desa yang dimiliki untuk kesejahteraan bersama akan mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

Pengembangan kewirausahaan desa menjadi salah satu bentuk nilai tambah bagi desa untuk mewujudkan desa menuju *Innovation Driven Economy* sesuai dengan visi pembangunan 2025. Strategi pelaksanaan MP3EI adalah dengan mengintregasikan tiga elemen utama (Dikti, 2013): mengembangkan potensi ekonomi wilayah; memperkuat konektivitas nasional yang terintregasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated*, *globally connected*), dan memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Dengan adanya visi pembangunan dengan menggali perkonomian desa dan kemandirian desa salah satunya dapat diwujudkan dengan direalisasikan program pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah unit usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusanya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87, Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes mewakili peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan dalam penyediaan layanan umum bagi masyarakat desa.

Kewirausahaan desa menjadi tujuan yang sangat baik untuk pembangunan ekonomi melalui perekonomian desa serta membentuk kemandirian masyarakat desa untuk menggali sumber daya dan potensi desa secara maksimal. Dengan adanya peraturan serta program yang diberikan oleh pemerintah sebagai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kewirausahaan desa. Maka kewirausahaan desa dapat terus berkembang dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Malang, Desember 2019

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEDESAAN MENUJU MASYARAKAT MANDIRI

Bahri Bhenu Artha[1] dan Widodo Prasetyo[2]
Universitas Widya Mataram
E-mail: [1]bahri@widyamataram.ac.id

ABSTRAK

Kewirausahaan merupakan salah satu program penting yang harus dibangun pemerintah desa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pemerintah desa dalam membangun kewirausahaan dan perekonomian desa melalui 1) pengembangan dan penguatan permodalan BUMDes, 2) membangun koperasi petani, 3) meningkatkan *skill*, 4)peningkatan infrastruktur. Pemerintah desa membangun wirausaha sebagai: 1) *fasilitator* dalam hal: a) bangun kewirausahaan, b) kepengurusan izin PIRT, c) pengadaan bibit unggul, d) pinjaman modal usaha, e) peningkatkan produktivitas, f) pengelolaan manajemen usaha, pemasaran dan informasi pasar, g) pengelolaan SDA. 2) *mediator* dalam hal a) memediasi kedua belah pihak yang bersengketa, dan b) memediasi antara petani dengan pembeli dalam hal transaksi jual beli. 3) *regulator* dalam hal a) menciptkan iklim bisnis kondusif, b) regulasi pengurusan izin usaha, c) waktu kepengurusan cepat, dan d) tidak memberlakukan pajak usaha di desa. 4) *motivator* dalam hal: a) penyuluhan pendirian usaha, b) manajemen usaha dan pemasaran, c) sistem pola tanam, d) penggunaan teknologi modern, dan e) menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Perekonomian Desa, dan Kewirausahaan.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

PENDAHULUAN

Membangun ekonomi kemandirian dan daya saing bangsa merupakan bagian dari cita-cita Indonesia. Kemajuan sebuah negara dilihat dari peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya melalui jumlah wirausaha yang menjadi indikator utama dalam mengukur kemajuan suatu negara. Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik adanya penambahan jumlah pengusaha di Indonesia dimana dari 1,6% menjadi 3,1% dari populasi 260 juta jiwa. Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, salah satu strategi penting pemerintah adalah dengan mengembangkan kewirausahaan pedesaan *(rural entrepreneurship)*.

Kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi (Wiratmo, 2018). Sedangkan Bahri (2019) menjelaskan wirausaha adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang yang mempunyai bakat dan kemampuan dalam menciptakan produk baru, menentukan tata cara dalam produksi, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan, pemasaran, kemampuan dalam permodalan dan pengelolaan keuangan.

Menurut Kartika, (2013) pembangunan kewirausahaan desa menjadi solusi untuk meningkatkan nilai tambah bagi desa menuju *innovation driven economy* yang dapat diwujudkan melalui 3 (tiga) hal yaitu: (1)

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

meningkatkan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi, distribusi dari pengelolaan asset dan akses (potensi) sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan bersinergi untuk pertumbuhan ekonomi, (2) mendorong terwujudnya peningkatan efesiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekenomian nasional dan, (3) mendorong penguatan sistem inovasi nasional disisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu Nawacita bapak presiden Joko Widodo dimana membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah desa dalam rangka mendorong pembangunan desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan (Caya dan Rahayu, 2019).

Desa dipandang sebagai entitas sosial yang memiliki karakter sosiologis, ekonomis, kultural, dan ekologis yang khas jika dibandingkan dengan perkotaan. Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan juga mendorong percepatan pembangunan di kawasan perdesaan. Kemiskinan di perdesaan terjadi karena adanya masalah ekonomi, kondisi fisik daerahnya tertinggal dan keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang tersedia sehingga mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan teknologi. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan,

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

strategi dan pelaksanaan pembangunan perdesaan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa yang telah berkembang dalam berbagai bentuk perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri. Adanya kesenjangan peningkatan perekonomian di desa harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk selalu melakukan perubahan (Elvina dan Musdhalifah, 2019). Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Edogbanya et al, 2013).

Pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam membangun usaha-usaha, mengurus wilayah dan keuangan desa (Prasetyo & Masdjojo, 2013). Sedangkan Elvina & Musdalifah (2019) menjelaskan pembangunan ekonomi desa merupakan prioritas utama pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bagian strategi penting pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan, karena melalui pertumbuhan ekonomi mengukur kemampuan dan keberhasilan pemerintah (Odhiambo, 2009). Sedangkan Sunu & Utama (2019) menjelaskan untuk menumbuhkan perekonomian yang baik, pemerintah dapat melakukannya dengan menciptakan tempat usaha, investasi, membuka lapangan pekerjaan, menyerap angkatan kerja demi mengurangi kemiskinan penduduk.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Untuk menumbuhkan kewirausahaan desa mempunyai kaitan erat dengan potensi desa yang dapat memberikan kemanfaatan dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan (Puspitasari, 2015). Pemerintah desa memiliki peran yang sangat vital dalam membangun kewirausahaan desa di daerahnya karena mampu mengurangi jumlah pengangguran dan peningkatan perekonomian masyarakat (Putra, 2015). Peran pemerintah desa dalam mengembangkan bakat, menanamkan keterampilan anggota masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu, upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, peningkatan usaha masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang mandiri.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme,* digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

bersifat kualitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat dan pemerintah Desa Gadingharjo, Kec. Sanden, Kab. Bantul. Lokasi penelitian ini dipilih karena beberapa pertimbangan berikut:

a Melihat tingkat partisipasi pemerintah Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul yang mendukung pembangunan kewirausahaan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b Masih tingginya masyarakat desa yang masih menjadi petani sebesar 60 persen.

c Masih kurangnya masyarakat Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul untuk menjadi wirausaha.

3. Sumber Data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitinya dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari khalayak yang ditetapkan

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

sebagai informan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pemerintah desa, ketua pedukuhan dan masyarakat di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015) data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder di dapatkan dari tabel statistik, buku peraturan desa, dokumen-dokumen, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dilokasi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Nazir, 2014).

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2015) observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Data observasi berupa informasi bentuk-bentuk kewirausahaan pedesaan yang mendukung peningkatan perekenomian serta peran pemerintah desa dalam

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

mensejahterakan masyarakatnya. Metode observasi ini penulis gunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui bentuk-bentuk kewirausahaan yang sudah dibangun pemerintah.

c. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan oleh peneliti yang terdiri dari Kepala Desa satu orang, Pamong Desa enam orang, Kepala Pedukuhan enam orang dan Masyarakat setiap pedukuhan enam orang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan aktivitas analisis dari Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Cara yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan tabel atau gambar.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk kategorisasi data.

HASIL PENELITIAN

1. Membangun Perekonomian dan Kewirausahaan Pedesaan Menuju Masyarakat Mandiri

a. Pembangunan, Pengembangan dan Penguatan permodalan BUMDes

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah mendorong masyarakatnya terlibat sebagai pelaku dan penggerak ekonomi desa. BUMDes dapat dimanfaatkan masyarakat Desa

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Gadingharjo dalam memasarkan produk-produk usaha hasil karya seperti emping mlinjo, stik ubi ungu, tepung ubi ungu, kerajinan tangan, sayur hidropolik, pupuk organik serta dalam akses permodalan seperti simpan pinjam melalui kerjasama dengan perbankan.

b. Membangun Koperasi Pertanian

Berdasarkan data yang tercantum di Keluarahan Gadingharjo dimana masyarakat Desa Gadingharjo, pekerjaannya adalah sebagai petani sebesar 60%. Dengan mendirikan koperasi bagi petani yang beranggotakan para petani di Desa Gandingharjo membantu petani dalam menyediakan benih unggul, pupuk dan bahan kebutuhan pertanian lainnya, tempat menabung dan memperoleh modal usaha.

c. Meningkatkan *Skill* dan Kualitas Wirausaha Mayarakat

Pemerintah Desa Gadingharjo dalam hal ini kepala desa memberikan dorongan dan meningkatkan *skill* dan kualitas masyarakatnya melalui pendidikan formal (sekolah) dan informal dengan memberikan pelatihan bisnis agar ide-ide bisnis masyarakat menjadi lebih baik dan mempunyai nilai jual tinggi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kepala desa memberikan pelatihan dalam hal: 1) peningkatan keterampilan dalam menghasilkan produk yang inovatif seperti pelatihan membuat stik ubi ungu, dan pembuatan tepung ubi ungu; 2) pelatihan keterampilan manajerial usaha seperti manajemen usaha dan marketing produk, pelatihan mengurus Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); 3) pengembangan mental berwirausaha melalui

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

penyuluhan dari para akademisi dan dinas pertanian dalam acara Bedah Buku dengan tema "Jiwa Kewirausahaan".

d. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur

Dalam membangun kewirausahaan di pedesaan perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dengan membangun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga, Kepala Desa Gadingharjo telah membangun infrastruktur seperti lembaga keuangan, jalan lingkungan, jalan pertanian, jalan raya, irigasi, drainase dan pasar tradisional.

2. Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Perekonomian dan Kewirausahaan Pedesaan

Peranan pemerintah desa merupakan cara atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam hal ini pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan mendorong masyarakat mandiri dengan memberikan program–program yang dijalankan. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah desa adalah pemberdayaan petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan penjualan. Untuk meningkatkan hasil pertanian dan penjualan untuk peningkatan perekonomian dengan pengolahan dan pemberian nilai tambah (*value added*) pada barang yang akan dijual ke pembeli.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji lebih dalam mengenai peran dalam membangun perekonomian dan kewirausahaan pedesaan di Desa Gadingharjo, Pundong, Bantul melalui program-program pembangunan pertanian pemerintah desa pada masalah yang dihadapi masyarakat petani agar dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing produk dibidang wirausaha pertanian. Adapun peran pemerintah desa terdiri dari:

1. Pemerintah Desa Sebagai *Fasilitator*

Peran pemerintah desa Gadingharjo dalam hal ini kepala desa memberikan dorongan agar ide-ide bisnis masyarakat Gadingharjo lebih baik dan mempunyai nilai jual tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa memberikan fasilitator dalam hal:

1). Pendirian kewirausahaan,
2). Pendampingan dalam hal kepengurusan perijinan PIRT,
3). Pendampingan pendirian koperasi petani, pembentukan kelompok tani dan pinjaman modal dari bank,
4). Memfasilitasi pengadaan tanaman hidroponik dan bibit unggul,
5). Memfasilitasi penyuluhan peningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis unggulan melalui peningkatan produktivitas,
6). Memfasilitasi penyuluhan pengelolaan usaha, pemasaran, dan informasi pasar,

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

7). Memfasilitasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di pedesaan.

2. Pemerintah Desa Sebagai *Mediator*

Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Kepala Desa Gadingharjo bertindak sebagai mediator antara petani dengan pembeli. Hasil penelitian ini Kepala Desa Gadingharjo bertindak sebagai mediator antara petani dengan pembeli dalam hal permasalahan transaksi jual beli hasil pertanian, perkebunan dan perternakan yang dibeli dengan harga tidak pantas.

3. Pemerintah Desa Sebagai *Regulator*

Peran pemerintah desa dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan *people*, industri, institusi, intermediasi, sumberdaya dan teknologi. Pemerintah dapat meningkatkan kewirausahaan pedesaan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Berdasarkan hasil penelitian peran Kepala Desa Gadingharjo memberikan kemudahan masyarakat dalam mengurus persyaratan administratif kepada setiap masyarakatnya seperti kemudahan kepengurusan perizinan pendirian usaha baik dari sisi administrasi maupun waktu kepengurusan dan tidak memberlakukan pajak usaha di desa.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

4. Pemerintah Desa Sebagai *Motivator*

Peranan pemerintah desa Gadingharjo dalam memotivasi masyarakat dalam berwirausaha memang begitu penting. Sebab pemberian motivasi pada petani dapat meningkatkan antusias dan keingintahuan petani untuk dapat mandiri, aktif, kreatif, dan semangat dalam bercocok tanam dan berwirausaha agribisnis. Berdasarkan hasil penelitian Kepala Desa Gadingharjo memotivasi masyarakatnya untuk mulai berwirausaha melalui peningkatan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi local.

PEMBAHASAN

1. Strategi Pemerintah Desa Dalam Membangun Perekonomian dan Kewirausahaan Pedesaan Menuju Masyarakat Mandiri

a. Pembangunan, Pengembangan dan Penguatan permodalan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan salah satu upaya pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan hasil usaha masyarakat dalam bidang pertanian, perekebunan menjadi produk dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes sangat dibutuhkan masyarakat

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Gadingharjo untuk memasarkan produk-produk dan juga membantu dalam akses permodalan.

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tantang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat dapat mendirikan, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maka setalah mendirikan BUMDes perekonomian dan pembangunan semakin meningkat, kualitas kehidupan masyarakat semakin membaik disebabkan pendirian BUMDes sangat sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di desa.

b. Membangun Koperasi Bidang Pertanian

Pengembangan sektor pertanian semakin melemah, penyebabnya meningkatnya biaya produksi berbanding terbalik dengan rendahnya harga jual dipasaran yang menjadi bumerang bagi petani, sehingga menyebabkan petani tidak semangat dalam menjalani profesinya menyebabkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan menjadi rendah. Hal ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di pedesaan menjadi rendah, saat ini timbul masalah yang semakin mengkhawatirkan dimana generasi muda pedesaan tidak mau berprofesi sebagai petani disebabkan tingkat

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

kesejahteraan petani terus mengalami penurunan. Tingkat keuntungan pertanian lebih banyak dinikmati pelaku agribisnis dihilir (Sumodiningrat, 2000). Pemerintah desa harus bisa membuat konsep untuk mengatasi permasalahan ini, dimana pemerintah perlu mendirikan sebuah kelembagaan pertanian yang mendukung kegiatan para petani dalam memperkuat daya beli hasil pertanian. Menurut Suhud (2005) dalam Wiguna dan Sukadana (2018) dijalaskan penguatan posisi daya tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak mutlak diperlukan oleh petani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui koperasi merupakan suatu upaya pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk meningkatkan produksi pertanian, memperbaiki sistem perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Mendirikan koperasi bagi petani yang beranggotan para petani di Desa Gadingharjo membantu petani dalam menyediakan benih unggul, pupuk, menabung dan memperoleh modal usaha. Selain itu pendirian koperasi di Desa Gadingharjo bertujuan untuk pemberdayaan petani dan pemasaran komoditas yang dihasilkan para petani serta memberikan jaminan kepastian harga produk pertanian, posisi tawar yang kuat sehingga kesejahteraan petani mengalami peningkatan disebabkan naiknya pendapatan petani yang bergabung dalam koperasi.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang disampaikan Baga, dkk (2009) dimana keberadaan koperasi atau kelembagaan pertanian bagi petani sangat penting terutama dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani dalam hal:

1) Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Dalam hal ini petani memiliki rebut tawar *(bargaining power)* yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang *(countervailing power)* dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi para petani.
2) Melalui koperasi petani mendapatkan pasar baru untuk produknya. Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan maka koperasi mengupayakan membuka akses dan pasar baru bagi produk anggotanya.
3) Melalui koperasi petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produk. Dengan bergabung menjadi anggota koperasi para petani lebih mudah melakukan penyesuaian produk melalui pengolahan paska panen sesuai dengan permintaan pasar.
4) Melalui koperasi petani lebih mudah dalam menangani resiko. Dengan penyatuan sumberdaya para petani dalam sebuah koperasi, maka petani lebih mudah dalam menangani resiko yang melekat pada produksi pertanian seperti pengaruh iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

5) Melalui koperasi, petani lebih mudah berinteraksi terkait proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam wadah organisasi koperasi para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM.

c. Meningkatkan *Skill* dan Kualitas Wirausaha Mayarakat

Pemerintah Desa Gadingharjo memberikan peningkatan *skill* dan kualitas berwirausaha kepada masyarakatnya dengan memberikan pelatihan agar ide-ide bisnis masyarakat menjadi lebih baik dan mempunyai nilai jual tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bapak kepala desa memberikan pelatihan dengan menghadirkan narasumber dari luar. Pelatihan yang diberikan terdiri dari 1). peningkatan keterampilan dalam menghasilkan produk yang inovatif seperti pelatihan membuat stik ubi ungu, dan pembuatan tepung ubi ungu; 2). pelatihan keterampilan manajerial usaha seperti manajemen usaha, marketing produk, dan pelatihan mengurus Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); 3). pengembangan mental berwirausaha melalui penyuluhan dari para akademisi dan dinas pertanian dalam acara Bedah Buku dengan tema "Jiwa Kewirausahaan".

Hasil penelitian diatas diperkuat oleh pendapat Suryana (2009) dimana dalam berwirausaha hal dasar yang harus dimiliki adalah kemampuan dalam mencari peluang untuk menuju kesuksesan.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Artinya kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda *(create new and different)* melalui berpikir kreatif dan inovatif. Suryana menambahkan kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah dipasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda melalui: a). pengembangan teknologi baru, b). penemuan pengetahuan ilmiah baru, c). perbaikan produk barang dan jasa yang ada, d). penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya lebih efisien. Selanjutnya Muhyi (2007) dalam Pasrizal (2011) menjabarkan seorang wirausaha yang sukses adalah mereka mempunyai ilmu pengetahuan, kualitas individu dan keterampilan *(skill)* yang terdiri dari:

1). Keterampilan manajerial (*managerial skill*)

Kemampuan manajerial berkaitan dengan kemampuan dalam menganalisis dan mengembangkan pasar, kemampuan mengelola sumber daya manusia, material, uang, fasilitas dan seluruh sumber daya yang ada merupakan syarat mutlak untuk menjadi wirausaha sukses. Keterampilan manajerial didapatkan melalui 2 (dua) cara yaitu jalur formal (pendidikan) dan informal (seminar dan pelatihan).

2). Kemampuan Membuat Konsep (*conceptual skill*)

Kemampuan dalam merumuskan konsep, tujuan, kebijakan dan strategi usaha sebagai landasan utama menuju wirausaha sukses. Keterampilan ini didapatkan melalui pengalaman sendiri dan orang lain.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

3). Keterampilan Memahami (*human skill*)

Kemampuan dalam bergaul, simpati dan empati kepada orang lain adalah modal utama yang sangat mendukung menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan ini dapat memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usaha. Kemampuan ini bisa didapatkan melalui keikutsertaan dalam organisasi.

4). Keterampilan pengambilan keputusan (*decision making skill*)

Dalam kemampuan ini dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan merumuskan dan memilih alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif lainnya. Selain itu wirausaha juga harus mampu mengelola informasi dalam pengambilan keputusan. Keterampilan ini didapatkan melalui pendidikan formal dan informal.

5). Keterampilan mengatur waktu (*time managerial skill*)

Dalam kemampuan ini dituntut dalam mengatur waktu secara baik dan benar. Ketidakmampuan dalam mengelola waktu secara baik dan tepat membuat pekerjaan menjadi menumpuk dan tidak terselesaikan membuat jiwa dan pikiran menjadi tidak tenang. Keterampilan mengelola waktu dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan rencana-rencana yang sudah dibuat.

d. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur

Dalam membangun kewirausahaan di pedesaan perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa. Berdasarkan hasil

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

penelitian Kepala Desa Gadingharjo telah melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya seperti lembaga keuangan, jalan lingkungan, jalan pertanian, jalan raya, irigasi, drainase dan pasar tradisional. Saat ini kualitas jalan raya menuju Desa Gadingharjo sudah baik dan memadai dimana kondisi jalan raya sudah aspal. Akan tetapi, yang masih kurang adalah lebar jalan sehingga perlu melakukan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pengunjung. Selain itu infrastruktur yang tersedia di Desa Gadingharjo ialah adanya pasar tradisional disetiap dusun sebagai tempat menjual produk hasil karya masyarakat serta mendukung peredaran produk hasil produksi serta pemerintah Desa Gadingahrjo melakukan perbaikan dan perluasan irigasi persawahan untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat petani di bidang produksi pertanian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Hilman (2017) dimana strategi pengembangan desa wirausaha di Desa Gunung Malang salah satu faktor pendukungnya adalah peningkatan kualitas infrastruktur. Hilman melanjutkan program pengembangan desa wirausaha akan berhasil jika didukung oleh infrastruktur yang memadai terutama akses jalan raya yang dilalui. Sedangkan Asnudin (2009) menjelaskan jenis infrastruktur penting yang mendukung proses kegiatan kewirausahaan masyarakat pedesaan meliputi (1) infrastruktur yang mendukung aksesibilitas berupa jalan raya dan jembatan pedesaan, (2) infrastruktur yang mendukung

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

produksi pangan, berupa irigasi pedesaan, (3) infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan berupa penyediaan air dan sanitasi pedesaan.

2. Peranan Pemerintah Desa Dalam Membangun Perekonomian dan Kewirausahaan Pedesaan Menuju Masyarakat Mandiri

a. Pemerintah Desa Sebagai *Fasilitator*

Peranan Kepala Desa Gadingharjo pada prinsipnya merupakan keterlibatan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diatur dalam perundang-undangan. Peranan kepala desa dalam pelayanan bertindak sesuai dengan pola pikir sebagai fasilitator terhadap warganya dengan memberikan dukungan dan pemberian fasilitas yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kepala Desa Gadingharjo memberikan dukungan dalam hal: 1) pendirian kewirausahaan, 2) pendampingan kepengurusan izin PIRT, 3) penanaman sayur hidropolik dan bibit unggul, pendirian koperasi petani, pembentukan kelompok tani dan pinjaman modal dari bank, 4) peningkatkan kegiatan ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas, 5) memfasilitasi masyarakat desa terhadap modal usaha,

6) penyuluhan pengelolaan manajemen usaha, pemasaran dan informasi pasar, 7) pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di pedesaan.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Hasil penelitian diatas didukung dengan hasil penelitian Julita (2018) dimana pemerintah desa sebagai fasilitator berkaitan dengan pendampingan pembangunan dan fasilitas pendukung pembangunan desa. Maka peran aktif pemerintah berdasarkan hasil penelitian Putra (2015) didapatkan peran pemerintah yaitu disaat usaha masyarakatnya mengalami kelemahan dan kemunduran tugas pemerintah sebagai *fasilitator* adalah memberikan pelatihan dan memfasilitasi dalam hal mencarikan bantuan untuk mendapatkan pendanaan atau modal usaha yang dibutuhkan.

b. Pemerintah Desa Sebagai *Mediator*

Mediasi merupakan proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak *(impartial)* dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Hasil penelitian ini Kepala Desa Gadingharjo bertindak sebagai mediator antara petani dengan pembeli dalam hal permasalahan transaksi jual beli hasil pertanian, perkebunan dan perternakan yang dibeli dengan harga tidak pantas.

Peran pemerintah desa sebagai *mediator* ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan tercantum dalam: Pasal 26 (1) menyebutkan *,Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa*". Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k menyatakan *,Dalam melaksanakan tugas*

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

sebagaimana dimaksud di ayat (1). Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa".

Sedangkan Julita (2018) menjelaskan keterlibatan pemerintah desa sebagai *mediator* dengan membantu masyarakat dalam hal pemberdayaan perekonomian. Keterlibatan kepala desa dalam memediasi agar terarah dan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Selanjutnya, Suratman dalam Ovinda (2018) menjelaskan peran kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara dilakukan untuk mencari jalan tengah dengan mengutamakan perdamaian dan mencari titik temu dari suatu masalah atau persoalan.

c. Pemerintah Desa Sebagai *Regulator*

Peran pemerintah desa sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pembangunan dan pengembangan kewirausahaan di pedesaan. Pemerintah desa harus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan iklim bisnis yang kondusif berhubungan dengan *people*, industri, institusi, intermediasi, sumberdaya dan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian peran Kepala Desa Gadingharjo sebagai regulator adalah memberikan kemudahan regulasi kepada masyarakat dalam mengurus izin pendirian usaha baik dari sisi administrasi dan waktu kepengurusan yang cepat serta tidak memberlakukan pajak usaha di desa.

Asti (2018) menjelaskan pemerintah desa sebagai pengelola desa secara mandiri melalui lembaga-lembaga ekonomi ditingkat desa

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

memiliki peranan penting dalam kebijakan desa. Pemerintah desa mempunyai peranan sebagai penggerak pembangunan desa melalui kebijakan-kebijakan yang mengatur pembangunan dan pengembangan usaha. Penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Putra (2015) dimana pemerintah sebagai regulator, berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha untuk tetap kondusif dalam melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis.

d. Pemerintah Desa Sebagai *Motivator*

Dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan kewirausahaan di pedesaan dapat dilakukan melalui peranan pemerintah desa dalam memberi motivasi. Peranan pemerintah sebagai *motivator* bertujuan untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan perekonomian desa. Peranan pemerintah desa dalam memotivasi masyarakat dalam berwirausaha memang begitu penting. Sebab pemberian motivasi dapat meningkatkan antusias dan keingintahuan masyarakat untuk mandiri, aktif, kreatif, dan semangat dalam berwirausaha. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Kepala Desa Gadingharjo memotivator masyarakatnya untuk mulai berwirausaha dengan mengundang narasumber seperti dosen (akademisi) dan dinas pertanian untuk melakukan penyuluhan tentang tata cara mendirikan usaha,

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

pengelolaan manajemen usaha, pemasaran digital, serta program Bedah Buku dengan tema "Jiwa Kewirausahaan, Para Pelaku Bisnis. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut akan tercipta sikap semangat berwirausaha.

Hasil penelitian diatas sama dengan hasil penelitian dari Ulumiyah, Gani & Mindarti (2013) dimana tujuan dari pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dicapai melalui penyuluhan, pelatihan dan pembinaan diberbagai bidang dengan harapan masyarakat bisa menjadi mandiri dan tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Penyuluhan yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah desa bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang manajemen usaha, sistem pola tanam padi, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin perontok padi serta perbaikan irigasi. Sedangkan penelitian Gani Djafar, & Paramata (2016) tentang peran pemerintah Desa sebagai motivator di desa Dulamayo Utara Kabupaten Gorontalo ditemukan bahwa peranan pemerintah desa dengan berusaha menggerakkan, menumbuhkan kesadaran, serta memberikan arahan kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasinya dalam keberhasilan pembangunan desa.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Strategi Pemerintah Desa Dalam Membangun Perekonomian dan Kewirausahaan Pedesaan dapat dilakukan melalui:
   1). Pembangunan, pengembangan dan penguatan permodalan BUMDes.
   2). Membangun koperasi bidang pertanian bertujuan untuk: a) memperbaiki posisi rebut tawar, b) mendapatkan pasar baru, c) lebih mudah dalam penyesuaian produk, d) mudah dalam menangani resiko, dan e) lebih mudah berinteraksi terkait proses peningkatan kualitas sumber daya manusia.
   3). Meningkatkan dan kualitas wirausaha mayarakat teridiri dari: a) keterampilan manajerial *(managerial skill*), b) keterampilan memahami sesama *(human skill*), c) keterampilan pengambilan keputusan *(decision making skill)*, dan d) keterampilan mengatur waktu *(time managerial skill)*.
   4). Peningkatan ketersediaan infrastruktur terdiri dari: a) lembaga keuangan, b) jalan lingkungan, c) jalan pertanian, d) jalan raya, e) irigasi, f) *drainase,* dan g) pasar tradisional.

b. Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Perekonomian dan Kewirausahaan Pedesaan terdiri dari:

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

1). Pemerintah desa sebagai *fasilitator* meliputi: a) pendampingan kewirausahaan, b) pendampingan kepengurusan izin PIRT, c) fasilitasi bibit unggul, d) pendirian koperasi petani, f) fasilitasi peminjaman modal dari, g) peningkatan produktivitas, h) penyuluhan pengelolaan manajemen usaha, pemasaran dan informasi pasar, i) pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan potensi desa.

2). Pemerintah desa sebagai *mediator* meliputi: a) memediasi pihak kedua belah pihak yang bersengketa, dan b) memediasi antara petani dengan pembeli dalam hal transaksi jual beli hasil pertanian dan perternakan.

3). Pemerintah desa sebagai *regulator* meliputi: a) menciptkan iklim bisnis yang kondusif, b) kemudahan regulasi dalam mengurus izin pendirian usaha baik, c) waktu kepengurusan cepat, dan d) regulasi tidak memberlakukan pajak usaha di desa.

4). Pemerintah desa sebagai *motivator* meliputi: a) penyuluhan tentang tata cara mendirikan usaha, b) manajemen usaha dan pemasaran, c) sistem pola tanam, d) penggunaan teknologi modern, dan e) menumbuhkan kesadaran pentingnya partisipasinya dalam pembangunan desa.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti perlu memberikan saran-saran, antara lain:

a. Bagi pemerintah desa terutama kepala desa diharapkan untuk terus terlibat langsung dalam pembangunan, pengembangan dan

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

pengelolaan BUMDes untuk lebih efektif lagi dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan BUMDes karena mempunyai dampak positif dalam pemberian modal, pengembangan usaha dan peningkatan perekonomian masyarakat.

b. Pemerintah desa diharapkan terus menjalankan program yang belum berjalan dan terus membuat program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan yang mendukung perbaikan sistem pembangunan perekonomian para petani. Selain itu masyarakat juga diharapkan terus ikut berpatisipasi dan memiliki rasa memiliki tinggi agar semua program pemerintah dalam membangun koperasi bidang pertanian terusberjalan.
c. Pemerintah desa diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan kualitas mayarakatnya dengan memberikan pelatihan, penyuluhan yang mendukung setiap aktivitas, sehingga masyarakat mampu mengetahui kelemahan dan hambatan yang dimilikinya serta mampu melihat kekuatan dan peluang usaha yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraannya.
d. Pemerintah desa dan lembaga-lembaga lainnya diharapkan untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan-kegiatan usaha dengan tujuan perkembangan perekonomian desa semakin maju dan meningkat agar masyarakat semakin sejahtera.
e. Pemerintah desa sebagai *fasilitator* diharapkan untuk terus memberikan bantuan dan memberi pendampingan serta memfasilitasi masyarakatnya disaat mengalami permalasahan dan membutuhkan

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

modal usaha agar tercapai kesejahteraan melalui peningkatkan perekonomian dan peningkatan produktivitas.

f. Pemerintah desa sebagai *mediator* diharapkan untuk tetap netral, seimbang dan mengambil keputusan yang terbaik, tidak menyakiti hati dan perasaan kedua belah pihak yang bersengketa ataupun yang mempunyai masalah sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 26 (4).
g. Pemerintah desa sebagai *regulator* diharapkan terus membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang usaha secara adil, transparan sehingga terciptanya iklim bisnis yang kondusif bagi *people*, industri, dan institusi lainnya.
h. Pemerintah desa sebagai *motivator* diharapkan untuk terus lebih ditingkatkan lagi dalam mendorong dan melakukan pendekatan-pendekatan secara langsung kepada masyarakat dengan mengandalkan tokoh masyarakat untuk menyampaikan kepada warga, serta terus memberikan dorongan secara langsung agar tetap terjalin hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakatnya.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

DAFTAR PUSTAKA

Asnudin, Andi. (2009). Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat. *Jurnal SMARTek*, 7 (4), hal. 292-300.

Asti & Cholid, Irfan. (2018). Persepsi dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan BUMDes Di Kecamatan Kendawangan. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 6 (1), hal. 1-14.

Baga LM, Yanuar R, W. K Feriyanto, Aziz K. 2009. Revitalisasi Peran Koperasi Persusuan Nasional (Studi Kasus Pada Daya Saing Koperasi Persusuan di Provinsi Jawa Barat). Bogor: Departemen Pertanian Republik Indonesia.

Bahri, S. E. (2019). Pengantar Kewirausahaan. CV. Penerbit Qiara Media.

Caya, M.F.N., & Rahayu, E. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Budeng Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 20 (1),hal. 1-12.

Edogbanya, Edejoh. (2013). Revenue Generation: Impact on Government Developmental Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East Senatorial District). *Global Journal of Management and Business Research*.

Elvina & Musdhalifah. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening. *JSHP*, 3 (1), hal.1-9.

Gani, G.,Djafar,L.,& Paramata, S.H. (2016). Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi,* 5 (1), hal.1-9.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Hilman, Iman. (2017). Penetapan Desa Wirausaha dan Strategi Pengembangannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi (JIMFE)*, 3 (2), hal. 28-36.

Julita, Marya. (2018). *Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Kote Kecamatan Sengkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2016-2017*. Kepulauan Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Kartika, Ray Septianis. (2013). Peluang Mengembangkan Kewirausahaan Desa Berbasis Potensi Desa (Studi Deskriptif di Desa Karang Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Kampung Suka Jawa, Kabupaten Lampung Tengah dan Desa Sidoasri, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lampung). *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5 (4), hal. 281-299.

Muhyi, H.A. (2007). *Menumbuhkan Jiwa dan Kompetensi Kewirausahaan*. Bandung: Unpad.

Odhiambo, N.M. (2009). Savings and Economics Growth in South Africa: A Multivariate Causality Test. *Journal of Policy Modeling*, 31 (5), 708- 718.

Ovinda, Liony Nike. (2018). *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Pada Desa Adjaya)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Pasrizal, Himyar. (2011). Meningkatkan Daya Saing Melalui Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal JURIS*, 10 (2), Hal:124-132.

Prasetyo, Y., & Masdjojo, G, N. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Remban. *In Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper Unisbank*, hal. 978-979.

Putra, Taranggana Gani. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 3 (1), hal. 1-10.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Puspitasi, Dewi Cahyani. (2015). Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. *Jurnal Studi Pemuda*, 4 (2), hal. 330-241.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan. (2000). Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan Pertanian. Jakarta: PT. Bina Reni Pariwara.

Suryana. (2009). *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.

Sunu, Made. K,K., & Utama, Made, S.(2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten /Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 (8), hal.843-872.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ulumiyah, Ita., Gani, A. J.A.,& Mindarti, L.I. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1 (5), hal. 890-899.

Wiguna, P.A.,& Sukadana, I.P. (2018). Peran Koperasi Unit Desa Dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani di Indonesia (Analisis Data Mikro). *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7 (1), hal. 30-57.

Wiratmo, Muhammad, M. (2018). Pengantar *Kewiraswastaan (Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis). Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)

Downloaded by Bahri Bahri (bahriwidyamataram@gmail.com)